

GEREJA DI TENGAH KEHIDUPAN MODERASI BERAGAMA**(Matius 22:37-40)****Aktualisasi Peran Gereja di tengah Kehidupan Moderasi Beragama Mewujudkan Masyarakat yang Damai dan Bersatu***Oleh: Perobahan Nainggolan, M.Th***Abstrak**

Istilah moderasi dalam bahasa Inggris disebut *moderation* yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Artinya sikap yang moderat selalu berada di tengah-tengah, baik menyelesaikan masalah maupun dalam bersikap dan berperilaku. Moderasi beragama sangat diperlukan sebab sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Ekstremitas agama sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradapan. Oleh karena itu moderasi beragama adalah bagian dari strategi suatu bangsa dalam merawat kemajemukan dan keberagamannya.

Menurut **Ridwan Lubis** bahwa moderasi beragama itu merupakan suatu pemikiran dan gagasan tidak ekstrem, terbatas dan memiliki alasan-alasan yang juga terbatas. Dengan demikian moderasi beragama suatu gerakan atau gagasan yang berusaha untuk menjadikan pemikiran keberagamaan tidak menimbulkan ekses terhadap yang lain. Dalam model keberagamaan yang ideal adalah lebih menekankan substansi atau makna dibanding dengan simbol, sehingga tidak menimbulkan ekses kekerasan atau radikalisme. Indonesia dikenal dengan Negara pluralitas. Kepluralitasan itu dijumpai dalam eksistensi masyarakat, yakni: agama, suku, bahasa, ras dan budaya. Masyarakat plural dan majemuk merupakan keunikan dan sekaligus menjadi kekayaan bangsa Indonesia sebagai ciri khas keindonesiaan yang patut dibanggakan. Dunia juga mengakui bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang dikenal dengan masyarakat multikultural, maksudnya bahwa Indonesia terdiri dari keragaman budaya yang dijalin dari berbagai individu dan etnis tertentu termasuk agama yang berinteraksi dalam komunitas masyarakat.

Kata kunci: Gereja, Agama, Moderasi, Majemuk, Pluralitas, Damai dan Bersatu.

Dalam tulisan ini, penulis bertujuan untuk menyadarkan ulang tentang aktualisasi gereja dalam memelihara kehidupan moderasi beragama demi untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan bersatu di bumi pertiwi bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Indonesia Hidup Dalam Pluralisme dan Multukulturalisme

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah Negara agama dan juga bukan negara sekuler. Indonesia bukan Negara agama dalam arti didasarkan atas salah satu agama dan juga bukan Negara sekuler yang bercorak duniawi dan mengaburkan keberadaan Tuhan. Berdasarkan UUD 1945, pasal 29 (ayat 1) dikatakan “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa”. Itu berarti bahwa Negara yang berdasarkan azas Pancasila yang ingin kita bangun bersama bukanlah suatu masyarakat tanpa agama, dan juga masyarakat yang anti agama.

Indonesia itu ada karena kebangsaan. Kebangsaan yang dimaksud adalah kita semua memiliki agama (religi) yang berbeda dan bersedia untuk saling menerima. Kebangsaan Indonesia merupakan kebangsaan etnis, artinya adanya perasaan kebersamaan berdasarkan cita-cita luhur yang dimiliki bersama. Pengalaman bersama akan ketertindasan dan keterhinaan karena keadaan terjajah sehingga melahirkan penderitaan bangsa melampaui perbedaan suku, etnik dan agama.

Kesadaran kebersamaan ini semakin menguat dalam perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Istilah pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak atau banyak, melainkan bahwa pluralisme secara substansial termanifestasikan dalam sikap untuk saling mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, mengembangkan dan memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak.

Soleh Hapudin mengatakan bahwa pluralisme menggambarkan keadaan masyarakat ketika setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda dapat memperkaya peran mereka dalam suatu masyarakat sebagai *sosial fabric*. *Sosial fabric* maksudnya bahwa setiap agama saling menghargai dan bersikap toleransi demi untuk kepentingan dan kemajuan bersama. Dengan demikian masyarakat pluralisme merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur dengan subkulturnya masing-masing, kemudian menjalin kesepakatan dalam menampilkan diri sebagai komunitas yang utuh serta dibarengi dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan sebagai hikmah yang positif.

Masyarakat multikultural juga merupakan masyarakat yang terdiri dari beberapa komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dan tentu memiliki perbedaan konsep mengenai dunia, sistem nilai organisasi, sosial, sejarah, adat-istiadat dan kebiasaan. Oleh karena itu, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang bersifat majemuk atau keanekaragaman kesukubangsaan atau etnisitas yang saling menerima dan menghargai sebagai realitas yang ada di tengah masyarakat.

Lebih lanjut **Soleh Hapudin** mengatakan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pada kesetaraan dan kesamaan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak eksistensi budaya yang ada, dengan kata lain bahwa penekanan utama dari multikulturalisme adalah kesetaraan budaya.

Dalam Islam terdapat tiga prinsip persaudaraan yang relevan untuk direnungkan oleh masyarakat Indonesia yakni: *pertama* Persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah islamiyah*): saudara kesemahlukan dan ketundukan kepada Allah, *kedua* persaudaraan sesama bangsa (*ukhuwah wathoniyyah*): seluruh umat adalah bersaudara sebab mereka berasal dari seorang ayah dan Ibu dan yang *ketiga* persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*). Dalam trilogi persaudaraan ini seharusnya menjadi cerminan bangsa Indonesia, sehingga ketiga *ukhuwah* tersebut di atas dapat menjadi unsur penting untuk membentuk jati diri masyarakat Indonesia yang beragama.

Hendropuspito mengemukakan ada empat sumber konflik sosial yang bersumber dari agama, yakni:

- 1. Perbedaan doktrin dan sikap mental.** Pada prinsipnya semua agama mengajarkan damai. Namun munculnya peluang terbukanya arena konflik sebab semua agama melakukan kritik terhadap ajaran agama yang lain dan bahkan memberi penilaian sendiri terhadap agamanya dan juga agama lawannya. Penilaian yang dilakukanpun bersifat subjektif sehingga nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan kemudian dijadikan sebagai patokan. Hal inilah yang disebut klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*). Agama Islam dan Kristen yang merupakan agama samawi (*revealed religion*) meyakini bahwa ajaran agamanya berasal dari Wahyu Ilahi (berasal dari Tuhan), selalu memiliki rasa superior sehingga menimbulkan konflik di tengah peradapan masyarakat.
- 2. Perbedaan suku dan ras pemeluk Agama.** Tidak dapat dimungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan dan ras

ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab terjadinya konflik dan perpecahan kelompok di tengah masyarakat. Contohnya: Kasus konflik suku Aceh dan suku Batak di Sumatera Utara. Kasus konflik di Aceh Singkil, Aceh bagian selatan, dimulai dari agresif komunitas suku Batak yang menyebar ke Utara Sumatera Utara dengan memulai tradisi membangun rumah ibadat secara sederhana yang disebut *undang-undang* yang memicu terjadinya konflik. Demikian juga konflik bisa terjadi akibat terjadinya mobilitas penduduk yang semakin intens akibat urbanisasi antara penduduk pendatang dengan penduduk asli dalam suatu daerah. Perbedaan suku dan ras pemeluk agama dapat menjadi sumber konflik ketika terjadi persinggungan antara masyarakat perantau akibat urbanisasi dengan masyarakat asli yang berada di suatu tempat.

3. **Perbedaan tingkat kebudayaan.** Kehidupan beragama adalah bagian dari budaya manusia. Secara sederhana dapat bedakan bahwa ada dua kategori kebudayaan, yakni: budaya tradisional dan budaya modern. Terjadinya konflik dalam suatu masyarakat beberapa tahun yang lalu antara kelompok Islam dan Kristen berpangkal dari persepsi yang berbeda dari kedua kelompok tersebut. Kelompok masyarakat setempat (Islam) memiliki budaya yang sederhana sedangkan masyarakat pendatang (Kristen) memiliki maju atau modern. Berkaitan dengan itu juga bahwa bentuk rumah ibadat gereja berwajah budaya barat dan mewah sedangkan masjid relative lebih berwajah sederhana. Perbedaan tingkat kebudayaan tersebut semakin berkembang ketika kelompok Agama Islam terkesan menjadi wilayah misi dari kelompok Kristen yang sudah dipengaruhi budaya barat yang memberi peluang terbukanya konflik sosial di tengah masyarakat.
4. **Mayoritas dan minoritas golongan agama.** Penyebab terdekat adanya konflik adalah faktor mayoritas dan minoritas dari penganut agama-agama. Di berbagai tempat terjadinya konflik bahwa massa yang menolak kehadiran komunitas dan jemaat baru adalah yang beragama Islam sebagai kelompok mayoritas. Namun ada juga di beberapa tempat contohnya: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, kaum Islam merasa ditekan sebab Kristen menjadi mayoritas. Dengan demikian faktor mayoritas dan minoritas sering memicu terjadinya konflik di daerah terutama dalam hal pendirian dan praktek dalam menjalankan peribadahnya. Hal ini terjadi oleh karena setiap agama memiliki pemahaman yang kurang proporsional dalam memaknai agama yang diyakininya dengan utuh.

Dalam mengatasi konflik di atas moderasi kehidupan beragama perlu diimplementasikan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural. Tidak ada ruang untuk memberikan penilaian agama dan budaya saya yang lebih baik dan superioritas. Negara harus menjamin kehidupan beragama yang toleran sebagaimana tercantum dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 9 dan 8 tahun 2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menegaskan: kerukunan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Gerakan Moderasi Agama Mengatasi Kekerasan dan Radikalisme

Moderasi beragama sangat diperlukan dalam konteks Indonesia yang multikultural dan plural, sebab fakta di lapangan dan di tengah masyarakat perilaku ekstrem atas nama agama sering

mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi dan bahkan peperangan yang merusak peradaban. Indonesia yang dihuni oleh 250 juta jiwa penduduk memiliki latar belakang budaya, agama, bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda perlu dirawat dengan baik agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Kepelbagaian perbedaan itu hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Semangat moderasi beragama dapat mempertemukan kelompok yang ekstrem (*ghuluw*) atau garis keras (*tasyadud*), baik ekstrem kanan atau konservatif maupun ekstrem kiri atau liberal perlu dimoderasikan.

Moderasi beragama dalam keanekaragaman umat dapat mewujudkan kerukunan umat beragama perlu adanya pemahaman dan kepedulian akan kesadaran multi budaya yang menghormati perbedaan, kemajemukan dan keinginan untuk berinteraksi dengan siapapun secara adil dan bijaksana. Sikap modersai beragama yang dimaksud berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain memiliki toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak orang lain.

Sri Muliono dalam Buku Moderasi Beragama, ada 3 (tiga) bagian implementasi moderasi beragama di Indonesia, yakni:

1. **Moderasi berhubungan dengan komitmen bernegara.** Komitmen bernegara sangat penting untuk melihat bagaimana kesetiannya terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara. Komitmen bernegara adalah sikap dalam penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang ada dalam konstitusi dan regulasi yang di bawah undang-undang Negara itu sendiri. Oleh karena itu seseorang yang kehilangan komitmen terhadap Negara dan pancasila berarti kehilangan watak moderatnya.
2. **Penguatan toleransi, baik toleransi sosial, politik maupun keagamaan.** Toleransi memberikan ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal itu berbeda dengan yang kita yakini. Sikap toleransi juga ditandai dengan sikap terbuka, sukarela, lapang dada, kelembutan dalam menerima perbedaan. Memiliki sikap *a gree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), *respect* (hormat), *acceptance* (penerimaan) dan *positive thinking and trustworthy* (berpikir positif dan percaya) antara satu agama dengan agama lainnya. Dengan kata lain bahwa kematangan demokrasi suatu bangsa diukur dari sejauh mana demokrasi itu dapat diterapkan dalam suatu bangsa tersebut. Aspek toleransi itu tidak hanya terkait dalam keyakinan agama melainkan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya dan lain sebagainya.
3. **Moderasi beragama melawan Radikalisme dan Fanatisme.** Inti dari Radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu dengan yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang yang diinginkan. Kelompok radikal ini menginginkan perubahan tersebut dengan singkat dan secara drastis yang bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Gerakan radikalisme ini juga sering dikaitkan dengan kelompok teroris dengan melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai bahkan meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka Fanatisme merupakan sikap senang yang diekspresikan secara berlebihan oleh suatu individu maupun kelompok tertentu. Fanatisme tidak hanya menimbulkan masalah sosial dalam suatu tempat tertentu, melainkan dapat menggerus keberagaman masyarakat yang damai menuju perpecahan. Oleh karena itu moderasi menjadi sangat urgen dalam menengahi persoalan radikalisme dan fanatisme guna tercapainya masyarakat yang aman, damai dan berkeadilan.

Implementasi moderasi beragama dalam komitmen bernegara bisa diletakkan sebagai kekuatan daya tahan menjadi penawar dan resiko intoleransi dan radikalisme atas nama agama. Jika seseorang mempunyai daya tahan yang kuat, maka dia akan mampu untuk menahan pengaruh intoleransi, radikalisme maupun fanatisme agama.

Aktualisasi Peran Gereja dalam Kehidupan Moderasi Agama di Indonesia

Pada prinsipnya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan perdamaian. Oleh karena itu konflik-konflik dan ketegangan yang ada dalam masyarakat hendaknya diselesaikan dengan baik. Agama-agama juga mengajarkan toleransi dalam arti bahwa tidak ada paksaan dalam hal agama, jadi bahwa setiap warga masyarakat perlu dihormati hak sucinya untuk hidup dan beribadat menurut apa yang diyakininya merupakan kehendak Tuhan baginya.

Masyarakat pancasila adalah masyarakat yang religious. sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 (ayat 1) “ Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia bukanlah “Negara agama” atau “agama Negara”.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang merupakan keunikan yang disebut juga demokrasi gotong royong mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Gereja dapat menerima demokrasi pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat sebagai akibat penerimaan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu berazaskan Pancasila.

Oleh karena itu, sebagai akibat menerima pancasila sebagai dasar Negara berarti juga tidak ada mayoritas dan minoritas. Dengan kata lain, gereja menolak pengertian istilah mayoritas dan minoritas baik suku, agama dan ras dalam menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara

Gereja sebagai bagian dari Negara tidak perlu memiliki etika politik khusus. Cita-cita Pancasila amat sesuai dengan keberadaan gereja. Oleh karena itu gereja harus mendukung sepenuhnya dan berdiri di belakang pancasila. Pancasila merupakan unsur kunci kesatuan bangsa. Semua komponen bangsa akan bersatu dalam satu bangsa dan Negara apabila semua memiliki komitmen menerima keberadaan pancasila.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa ancaman terhadap Pancasila oleh kaum ekstrem, fundamentalis, picik agamais, mencoba untuk mengganggu dan merongrong Pancasila sebagai identitas dasar Negara. Gereja sebagai sabagi bagian integral dari bangsa memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja tidak bersikap apatis dan hanya menjadi penonton melainkan ikut memberikan kontribusi yang nyata bagi Negara. Dengan kebebasan beragama berarti bahwa Negara pancasila menjamin kebebasan tanpa batas. Kebebasan harus diletakkan di dalam kerangka dan batas kesatuan serta persatuan bangsa yang merupakan satu sendi utama dari jiwa pancasila itu sendiri. Oleh karena itu prinsip tersebut berdampingan dan bertalian erat dengan prinsip yang kedua, yaitu prinsip kerukunan beragama

Franz Magnis-Suseno memberikan beberapa sugesti dalam kehidupan moderasi Bergama Indonesia, yakni:

- ✓ Kita harus mengakhiri bahasa hasutan di antara kita, harus berhenti bicara jelek tentang agama yang satu dengan yang lain, juga dalam lingkungan umat/saudara seagama sendiri.
- ✓ Cara-cara penyebaran agama yang agresif – mendekati orang tanpa diminta – harus dihentikan. Dalam hal ini termasuk pemakaian paksaan, bujukan, pemanfaatan kekeurangan pendidikan dan lain cara yang tidak wajar untuk penyebaran agamanya sendiri. Dan bahkan jangan mendatangi yang sudah beragama dan mengajak pindah agama. Dan sebaliknya juga sangat menghormati hak azasi agama yang diyakininya jikalau itu sudah menjadikan keputusan agama yang diyakininya dengan sungguh-sungguh.

- ✓ Kita perlu bersedia menerima pluralitas agama, artinya menerima bahwa cara hidup bersama dan system hukum yang mendasarinya, dapat diterima oleh semua komponen bangsa.
- ✓ Hendaknya para pimpinan dan panutan umat beragama yang merupakan mayoritas di suatu wilayah mengajak umat mereka agar selalu merasa bertanggungjawab atas keamanan, keselamatan dan rasa diterima sepenuhnya umat beragama minoritas.
- ✓ Umat-umat yang minoritas menjawab sikap mengayomi umat mayoritas dengan membangun rasa peka terhadap perasaan mayoritas sehingga menghindari dari kelakuan dan bentuk-bentuk ekspresi yang terasa provokatif terhadap mayoritas. Oleh karena itu perlu dibangun dan dilatih sikap tenggang rasa dari semua umat beragama.

Gereja-gereja di Indonesia harus menerapkan moderasi hidup beragama dengan membuka jejaring dengan agama-agama yang ada di Indonesia: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konfuchu. Gereja tidak bersikap eksklusif yang hanya memikirkan dirinya sendiri melainkan bersikap inklusif yang memiliki satu perasaan dalam kebersamaan unruk mewujudkan harmonisasi umat beragama.

Di bawah ini ada beberapa bentuk peran gereja dalam memelihara moderasi beragama untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan bersatu.

1. Gereja memberi dukungan Penuh terhadap Pancasila

Melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila sebagai dasar praktek dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mempunyai nilai-nilai yang diperjuangkan oleh gereja. Oleh karena itu, gereja harus mempunyai nilai yang positif terhadap pancasila. Ada beberapa alasan, mengapa gereja mendukung Pancasila, yaitu:

- 1.1 Nilai-nilai pancasila dalam terang iman Kristian. Nilai-nilai pancasila yang tumbuh dan berkembang dari kebudayaan Indonesia Indonesia sangat dihargai oleh nilai-nilai kristiani.
- 1.2 Bhineka Tunggal Ika. Dukungan gereja terhadap pancasila timbul dari kesadaran yang dalam bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang terungkap dalam perkembangan kehidupan dan sejarah bangsa. Bhineka Tunggal Ika dalam terang pancasila merupakan kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu. Dalam kaitannya dengan sila ke-tiga menyatakan agar dihindari diskriminasi. Diskriminasi tidak dibenarkan di Negara pancasila.

2. Gereja terlibat aktif dalam Dialog antar umat beragama

Hidup rukun dengan agama lain merupakan merupakan unsur penting yang perlu dipelihara sebagai bagian integrasi nasional yang menjadi kebutuhan dalam rangka menjaga stabilitas nasional yang aman, damai dan bersatu. Gereja sebagai salah satu agama yang resmi ikut serta membangun dialog antar umat beragama. Agama sebagai inspirasi dapat dipahami sebagai upaya membangun relasi dialogis antar umat beragama. Dalam dialog ini masing-masing individu dipanggil untuk merajuk kasih dalam persaudaan dan mau berbagi dengan yang lainnya termasuk pengalaman kehidupan walaupun berbeda keyakinan.

3. Gereja memelihara kerukunan Intern, kerukunan Ektern dan kerukunan dengan Pemerintah.

Gereja hidup bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain. Gereja harus bersikap inklusif bukan eksklusif. Berkenaan dengan itu gereja secara intern harus memelihara keesaan gereja yang disebut dengan oikumene. Perpecahan, permusuhan dan keterpisah-pisahan

di antara orang Kristen sangat dikecam oleh Alkitab (bdk. 1 Kor.1:10-17; 3:1-9). Yesus berdoa, “suapaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang mengutus Aku” (Yoh. 17:21). Hal ini memberikan pernyataan bahwa keesaan dan kesatuan gereja itu adalah “hakikat” yang sudah diletakkan Kristus.

Gereja juga harus memelihara kerukunan hubungan antarumat beragama, demikian juga dengan pemerintah. Tema yang menonjol dalam hubungan dengan antar umat beragama adalah relasi dalam kasih, kebenaran dan kebebasan. Kerukunan itu berisikan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang menghargai perbedaan, tanpa pemisah-misahan (*apartheid*). Kerukunan yang dihasilkan oleh dikrimniasi, segregasi dan *apartheid* adalah kerukunan yang palsu, jahat, dan amoral, sebab tidak didasari oleh kasih, kebenaran, keadilan dan kebebasan. Demikian juga hubungannya dengan pemerintah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila memahami hubungan agama dan Negara sebagai hubungan kemitraan yang setara dan timbal balik. Asumsi pokok dari hubungan kesetaraan dan timbal balik antara agama dengan Negara adalah pengakuan bahwa baik agama maupun Negara mempunyai fungsi, wewenang dan kedaulatannya masing-masing, wajib dihormati dan tidak boleh dicampuri ataupun dilanggar oleh orang lain.

Berdasarkan 3 (tiga) point dari aktualisasi gereja di atas, orang Kristen (Gereja) memandang dan melihat Yesus sebagai contoh dan norma akhir sebagai dasar untuk berikap dan bertindak. Dasar dari sikap dan tuntunan Yesus adalah perintah utama yaitu Perintah mengasihi. Berawal dari pertanyaan seorang ahli Taurat: “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? “Yesus menjawab:”Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri! Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. (Matius 22:37-40).

Penutup dan Himbauan

Indonesia sebagai Negara yang pluralitas dan multikultural harus menjadikan kehidupan Moderasi beragama sebagai pilar utama dalam merawat dan memperkokoh kesatuan bangsa. Gereja sebagai bagian dari Negara bertanggungjawab untuk mengimplementasi moderasi agama yang dimaksud untuk menghindari konflik sosial di tengah masyarakat. Perilaku ekstrem atas nama agama sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi dan bahkan peperangan yang merusak peradaban. Oleh karena itu moderasi agama adalah suatu alat yang paling ampuh untuk merawat dan memelihara keharmonisan antarumat beragama. Gereja juga harus mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan bersatu.

Dalam menjalani hidup keberagamaan di bumi Indonesia ini, sudah waktunya kita menyepakati dan dengan tegas menaati bahwa budaya kekerasan yang ada di dalam masyarakat harus diakhiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut penolakan terhadap kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Orang yang masih memakai cara kekerasan adalah orang yang tidak beradab. Marilah kita menerapkan budaya kehidupan moderasi beragama sebagai jembatan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi Agus, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Diktat Keagamaan Vol 13. No.2, 2019)
- Hapudin Moh.Soleh, *Moderasi Beragama: Memaknai Kebersamaan Dalam Keberagaman* (Jakarta: Pustaka Diniyah, 2021)
- Jali Abdul, dkk *Moderasi Beragama: Merajut Persaudraan Antarumat Beragama* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021)
- Kaban Y.B, dkk, *Harmonisasi Umat Beragama: Merawat Keberagaman Dalam Bingkai Kebhinekaan* (Surabaya: Global Aksara Press, 2021)
- Lubis Ridwan HM, *Gerakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme* (Jakarta: PT Elex Media Komputido Kelompok Gramedia, 2020)
- Octavianus A, *Kepemimpinan Krsiten Dalam Negara Pancasila*, (Malang: YPPH, 1989)
- Pattiasina JM, *Tegar Mekar di Bumi Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990)
- Susilo Eko Budi, *Gereja dan Negara* (Malang: AVERROES, 2002)
- Suseno Franz M, *Bahan ceramah dengan “Etika Perdamaian Antar Agama” pada Seminar Nasional Teologi Kebangsaan “Agama dan Perdamaian”* (STT GMI Bandar Baru: 13-15 April 2016)